



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DITJEN PAUDNI TAHUN 2012

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan program PAUDNI tahun 2012 telah terlaksana. Tentunya, ada keberhasilan dan kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan program PAUDNI tahun 2012 ini. Apapun hasilnya, Ditjen PAUDNI perlu melakukan pertanggungjawaban secara tertulis.

LAKIP Ditjen PAUDNI Tahun 2012 disusun untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan program PAUDNI sejak Januari sampai dengan bulan Desember 2012. Laporan ini memuat analisis pencapaian dan kesenjangan antara rencana indikator kegiatan dengan realisasinya. Selain itu, diuraikan bagaimana realisasi keuangan sebagai salah satu indikator akuntabilitas kinerja.

Dalam laporan ini dimuat juga Rencana Strategis Ditjen PAUDNI tahun 2012 yang berfungsi untuk melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PAUDNI, termasuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI tahun 2012 yang berfungsi sebagai rencana untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis Ditjen PAUDNI tahun 2012. Dalam LAKIP Tahun 2012 ini juga dilampirkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi setiap Satuan Kerja dan pengambil kebijakan, untuk memperhatikan hal-hal yang kurang dan memperbaikinya dalam upaya merealisasikan target yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Jakarta, Februari 2013
Direktur Jenderal PAUDNI,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Tugas dan Fungsi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Kinerja	12
B. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja	21
B. Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Misi Kerja	13
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis	13
Tabel 2.3	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS1	14
Tabel 2.4	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS2	14
Tabel 2.5	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS3	14
Tabel 2.6	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS4	14
Tabel 2.7	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS5	14
Tabel 2.8	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS6	14
Tabel 2.9	Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS7	15
Tabel 2.10	Layanan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	16
Tabel 2.11	Layanan Pembinaan Kursus dan Pelatihan	16
Tabel 2.12	Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	16
Tabel 2.13	Layanan Pembinaan PTK PAUDNI	17
Tabel 2.14	Layanan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI	18
Tabel 2.15	Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan PAUD	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Kursus dan Pelatihan	22
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan PTK PAUDNI	26
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Kegiatan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI	30
Tabel 3.6	Kondisi Serapan Anggaran di Lingkungan Ditjen PAUDNI	32

DAFTAR GRAFIK

No.	Nama Grafik	Halaman
Grafik 3.7	Realisasi Daya Serap Ditjen PAUDNI Tahun 2012 Menurut Jenis Belanja	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014 disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2012.

Kinerja Ditjen PAUDNI diukur dari pencapaian penetapan kinerja yang dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012.

Kinerja tersebut juga memperhatikan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2010-2014 (yang disingkat dengan misi 5K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan serta kepastian/keterjaminan di dalam memperoleh layanan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian misi 5K tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirinci melalui target setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang ditetapkan pada unit kerja eselon I yang akan dicapai melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II di bawahnya berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Ukuran kinerja Ditjen PAUDNI dinilai dari pencapaian lima layanan kegiatan yaitu layanan pendidikan anak usia dini, layanan pendidikan masyarakat, layanan kursus dan pelatihan, layanan penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUDNI serta layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Fungsi program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diemban oleh Ditjen PAUDNI adalah untuk memenuhi tujuan strategis (1) tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota dan (2) tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2012, dari 41 IKK yang ada untuk mendukung ketercapaian tujuan strategis Ditjen PAUDNI, hasil yang dapat dicapai adalah 25 IKK melebihi target, 4 IKK sesuai target dan 12 IKK kurang dari target. Sementara itu, realisasi anggaran yang ditargetkan sebesar 95% dapat dicapai 94,24%.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi diperlukan di dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan bergulirnya reformasi, pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998. Sebagai turunan dari TAP MPR tersebut dikeluarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjelaskan tentang asas penyelenggaraan negara, salah satunya adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai mekanisme untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Untuk itu, dalam rangka pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan, maka setiap unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pengejawantahan dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini keluar dengan alasan perlunya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara formal yang dilakukan secara rutin, pada setiap tahun yang berjalan. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang sebagai salah satu jawaban untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan legalitas pelaksanaan akuntabilitas tersebut, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki

kewajiban untuk menyusun LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara operasional, tugas dan fungsi Ditjen PAUDNI dirinci dalam kegiatan-kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Ditjen PAUDNI, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Setditjen PAUDNI);
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
5. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI;
6. Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PP-PAUDNI) Regional I Jayagiri (Jawa Barat) dan Regional II Ungaran (Jawa Tengah);
7. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) Regional I Medan (Sumatera Utara), Regional II Surabaya (Jawa Timur), Regional III Makassar (Sulawesi Selatan), Regional IV Banjar Baru (Kalimantan Selatan), Regional V Mataram (NTB) dan Regional VI Sentani (Papua);

Selain itu, program bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal juga dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan, yaitu:

1. Sub Dinas Pendidikan Nonformal dan Informal (d/h Subdin Pendidikan Luar Sekolah) pada Dinas Pendidikan Provinsi.
2. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) sebagai UPTD yang menangani PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal pada Tingkat Provinsi.
3. Sub Dinas Pendidikan Nonformal dan Informal (d/h Subdin Pendidikan Luar Sekolah) pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
4. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai UPTD yang menangani PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal pada Tingkat Kabupaten/Kota.
5. Satuan Pendidikan PAUDNI atau Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan yang menyelenggarakan kegiatan dan layanan di bidang PAUD dan pendidikan nonformal.

Secara umum, lembaga-lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan nonformal, maka lembaga-lembaga tersebut harus melakukan koordinasi dalam membangun kerja sama. Koordinasi memungkinkan pengembangan sinergi sumber daya dan sinkronisasi program di bidang pendidikan nonformal dapat direalisasikan secara optimal sehingga pada akhirnya pelaksanaan dan pelayanan program pendidikan nonformal dapat dilakukan secara optimal kepada masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, program tersebut harus dilaksanakan secara demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

Ditjen PAUDNI memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan program layanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Bahkan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan

dan standardisasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, peran dan fungsi pemerintah masih cukup besar. Sekurang-kurangnya, kebijakan dan standardisasi teknis tersebut dapat menjadi arah dan pedoman, sekaligus indikator keberhasilan pelaksanaan program-program layanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan nonformal dan informal bukan hanya berdasarkan kebutuhan sesaat, melainkan harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis agar pelaksanaan program itu dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan mutu sumber daya masyarakat dan perbaikan hidup dan kehidupannya. Inilah sesungguhnya, hakikat layanan dan pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang harus direalisasikan secara nyata, merata, bermutu, berkeadilan dan akuntabel.

Pembangunan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagai bagian dari pendidikan dan kebudayaan merupakan upaya bersama dari seluruh komponen pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan sistematis agar peserta didik sesuai dengan potensinya dan secara aktif dapat mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan kualitas, harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang berdaulat sebagaimana amanat pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks ini, pendidikan harus dilihat sebagai *human investment* yang mempunyai perspektif multidimensional, yaitu: sosial, budaya, ekonomi dan politik. Namun, untuk mewujudkan pemikiran atau gagasan tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti lemahnya *good governance* dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Masih belum optimalnya pelaksanaan *good governance* menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan dan akuntabel. Sementara, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal belum dapat direalisasikan secara optimal sebagai akibat rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Kondisi ini terasa semakin berat apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang memiliki sasaran masyarakat marginal yang lemah secara ekonomis dan lemah dalam mengakses layanan pendidikan. Di samping itu, sebagian besar sasaran program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal tinggal di daerah-daerah pedesaan yang terpencil dan terisolir.

Untuk mengatasi kelemahan dan tantangan tersebut, sekurang-kurangnya ada 2 (dua) persoalan yang harus dicermati agar program-

program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kedua persoalan itu adalah: (1) *capacity building* kelembagaan dan personil PAUDNI dan (2) peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Persoalan ini semakin penting apabila dikaitkan dengan fungsi pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal yang saling memperkaya. Di samping itu, pendidikan nonformal dan informal dilaksanakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Upaya perwujudan *Good Governance* dimulai pada tahun 1999 seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang makin berkembang. Jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang sebagai salah satu indikator atau parameter dalam mewujudkan *good governance*, maka langkah nyata menuju ke arah ini mutlak diperlukan. Oleh karenanya, sejak tahun 2000 setiap instansi pemerintah harus menyusun LAKIP. Setidaknya dari pelaporan tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah secara administratif, sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan administratif.

Direktorat Jenderal berusaha melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas program dengan menyusun LAKIP Ditjen PAUDNI tahun 2012. Laporan akuntabilitas kinerja ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan kontrak kinerja yang diperjanjikan dalam penetapan kinerja tahun 2012. Tingkat pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, pencapaian kinerja dari penetapan kinerja, laporan akuntabilitas ini juga menginformasikan capaian kinerja yang berhasil dicapai di luar penetapan kinerja. Dengan demikian LAKIP tahun 2012 ini, diharapkan dapat:

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012 antara lain:

- a. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan untuk tahun yang akan datang;
- c. sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang diperlukan

D. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal PAUDNI memiliki kelengkapan

organisasi yang terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI. Masing-masing unit kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat) yang berkedudukan di daerah, yaitu:

- PP-PAUDNI Regional I Jayagiri, Bandung, Jawa Barat.
- PP-PAUDNI Regional II Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
- BP-PAUDNI Regional I Medan, Sumatera Utara.
- BP-PAUDNI Regional II Surabaya, Jawa Timur.
- BP-PAUDNI Regional III Makassar, Sulawesi Selatan.
- BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
- BP-PAUDNI Regional V Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- BP-PAUDNI Regional VI Sentani, Papua.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- c. pengelolaan data dan informasi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- e. pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- f. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;

- i. koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;
- j. pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu: Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Kepegawaian, dan Bagian Umum. Masing-masing bagian mempunyai tugas dan fungsi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012.

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan anak usia dini. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat PAUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- c. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- d. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu: Subdirektorat Program dan Evaluasi, Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan, satu unit eselon 4 yaitu Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- d. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu: Subdirektorat Program dan Evaluasi, Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan, satu unit eselon 4 yaitu Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kursus dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- c. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- d. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dibantu oleh beberapa unit

eselon III, yaitu: Subdirektorat Program dan Evaluasi, Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan, satu unit eselon 4 yaitu Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- d. pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- f. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- h. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu: Subdirektorat Program dan Evaluasi, Subdirektorat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat, satu unit eselon 4 yaitu Subbagian Tata Usaha serta Jabatan Kelompok Fungsional.

6. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat)

Ditjen PAUDNI memiliki 8 (delapan) UPT Pusat yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan tingkat eselon yang disandang, yaitu: (1) PP-PAUDNI sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal; dan (2) BP-PAUDNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal. Masing-masing UPT Pusat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. PP-PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program dan model pendidikan, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, penerapan model, dan pengembangan sumber daya di bidang anak usia dini pendidikan nonformal dan informal. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, PP-PAUDNI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 2) Pengembangan program pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 3) Pengembangan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 4) Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam pencapaian standar pendidikan nasional;
 - 5) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pelaksanaan model pendidikan serta pengembangan pemberdayaan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 6) Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 7) Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal; dan
 - 8) Pelaksanaan urusan administrasi pusat.
- b. BP-PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Dalam menyelenggarakan tugasnya, BP-PAUDNI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 2) Pengembangan program pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 3) Pengembangan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 4) Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam pencapaian standar pendidikan nasional;
- 5) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pelaksanaan model pendidikan serta pengembangan pemberdayaan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 6) Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 7) Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal; dan
- 8) Pelaksanaan urusan administrasi balai.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) mengatakan bahwa tujuan strategis yang harus dicapai oleh Kemdikbud tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014.

Dalam rangka penguatan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) juga menetapkan Rencana Strategis untuk tingkat Direktorat Jenderal.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUDNI mencakup visi, misi, dan tujuan strategis serta sasaran strategis. Dalam pelaksanaannya, seluruh unit yang ada di dalam lingkungan Ditjen PAUDNI melandaskan diri pada Renstra.

a. Visi dan Misi

Visi Ditjen PAUDNI yakni “terselenggaranya layanan pendidikan untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan profesional”. Hal ini merupakan cita-cita untuk membangun pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan di masa depan.

Misi Ditjen PAUDNI yakni “memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini, penyediaan layanan pendidikan masyarakat, penyediaan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan, penyediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik”.

b. Misi Kerja

Untuk melaksanakan misi Ditjen PAUDNI, pelaksanaan kegiatan yang ada pada program dilandasi dengan misi kerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Misi Kerja

KODE	MISI KERJA
MK1	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD nonformal dan informal bermutu dalam rangka mewujudkan anak yang cerdas, kreatif, sehat ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik dan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.
MK2	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas berbasis pendidikan kecakapan hidup, bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
MK3	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan kursus dan pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang bermutu, berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berkesetaraan gender untuk pengembangan berkelanjutan, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
MK4	melaksanakan penguatan system manajemen pendidikan nonformal dan informal meliputi tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public dalam rangka penjaminan mutu
MK5	mengembangkan minat baca masyarakat melalui ketersediaan TBM yang merata dan meluas serta bermutu.
MK6	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan kebutuhan secara berkelanjutan
MK7	mengembangkan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan yang berkeadilan gender.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk merealisasikan visi dan misi yang sudah ditetapkan maka dirumuskan tujuan strategis Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014 yang berdasarkan pada layanan PAUD, Nonformal dan Informal dan sistem tata kelola untuk menghasilkan pelayanan prima bidang pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS
TS1	meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan layanan dan mutu program PAUD, nonformal dan informal yang mampu melejitkan dan mengembangkan seluruh potensi kecerdasan anak untuk menyiapkan anak mengikuti pendidikan lebih lanjut
TS2	menuntaskan penduduk buta aksara melalui program pendidikan keaksaraan yang bermutu dan terjangkau
TS3	meningkatkan program kursus dan pelatihan berbasis kecakapan hidup yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru
TS4	meningkatkan budaya baca melalui Taman Bacaan Masyarakat
TS5	meningkatkan program pendidikan pemberdayaan perempuan yang sensitif gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)
TS6	meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam upaya penyadaran masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, dan peran laki-laki dan perempuan sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender
TS7	meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan bermartabat sesuai dengan kebutuhan dan secara berkesinambungan
TS8	meningkatkan kapasitas manajemen dan kelembagaan PNFI yang bermutu dan profesional
TS9	meningkatkan kompetensi dan pengembangan sumber daya PNFI yang bermutu dan profesional
TS10	meningkatkan kemitraan penyelenggaraan pendidikan PAUD, Nonformal dan Informal

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian dari Tujuan Strategis diperlukan sejumlah Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai sampai dengan tahun 2014. Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS1

Tabel 2.3 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS1

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS1.1	APK PAUD Kemdiknas 45.1%
SS1.2	Persentase Kelurahan/Desa yang memiliki minimal dua lembaga PAUD 82.0%
SS1.3	Lembaga PAUD yang berakreditasi 42.5%
SS1.4	Lembaga PAUD yang telah menyelenggarakan Pendidikan keorangtuaan 10%

2) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS2

Tabel 2.4 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS2

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS2.1	Menurunkan angka penduduk buta aksara 15-59 tahun 3,83%
SS2.2	Meningkatnya pemegang SUKMA mengikuti KUM 20%
SS2.3	Disparitas Gender penduduk berkeaksaraan usia 15-59 tahun 2%

3) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS3

Tabel 2.5 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS3

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS3.1	Meningkatnya anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan berbasis kecakapan hidup 13%
SS3.2	Meningkatnya jumlah peserta didik kursus dan pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi 30.000 orang;
SS3.3	Meningkatnya jumlah lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang terbentuk 36%
SS3.4	Meningkatnya jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terbentuk 641 TUK;
SS3.5	Meningkatnya jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 5%;
SS3.6	Meningkatnya jumlah LKP berstandar internasional 1%;
SS3.7	Meningkatnya jumlah LKP yang memenuhi standar nasional 5%
SS3.8	Meningkatnya jumlah LKP di pedesaan 5%;

4) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS4

Tabel 2.6 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS4

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS4.1	Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM 69%
SS4.2	Meningkatnya Kecamatan yang memiliki PKBM 80%
SS4.3	Meningkatnya Kab/Kota yang memiliki PKBM rujukan 80%
SS4.4	Meningkatnya Kab/Kota yang telah menyelenggarakan parenting education 50%

5) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS5

Tabel 2.7 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS5

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS5.1	Meningkatnya persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup 20%

6) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS6

Tabel 2.8 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS6

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS6.1	Meningkatnya persentase kab/Kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan 68%
SS6.2	Meningkatnya persentase Kab/Kota yang menyediakan layanan pencegahan tindak pidana perdagangan orang 20%

7) Sasaran Strategis Untuk Mencapai Tujuan Strategis TS7

Tabel 2.9 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis TS7

KODE	SASARAN STRATEGIS
SS7.1	Meningkatnya persentase pendidik PAUDNI berkualifikasi S1/D4 6.5%
SS7.2	Meningkatnya persentase pamong belajar berkualifikasi S1/D4 98.3%
SS7.3	Meningkatnya persentase penilik berkualifikasi S1/D4 70%
SS7.4	Meningkatnya persentase pendidik PAUD mengikuti Diklat teknis 31%
SS7.5	Meningkatnya persentase pendidik Kursus dan Pelatihan mengikuti Diklat Teknis 27%
SS7.6	Meningkatnya persentase pendidik Dikmas mengikuti diklat teknis 31%
SS7.7	Meningkatnya persentase pelatih dan Pembina Pramuka mengikuti diklat teknis 10%
SS7.8	Meningkatnya persentase pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungsional 85%
SS7.9	Meningkatnya persentase penilik mengikuti diklat teknis dan fungsional 65%
SS7.10	Meningkatnya persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis 30%
SS7.11	Meningkatnya persentase pendidik PAUD yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan 21%
SS7.12	Meningkatnya persentase pendidik kursus dan pelatihan yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan 1.67%
SS7.13	Meningkatnya persentase pendidik Dikmas mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB) 25%
SS7.14	Meningkatnya persentase pamong belajar mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) 40%
SS7.15	Meningkatnya persentase penilik mengikuti Pengembangan profesional Berkelanjutan (PPB) 40%
SS7.16	Meningkatnya persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan 21%
SS7.17	Meningkatnya persentase guru TK/TKLB penerima tunjangan profesi 2.07%
SS7.18	Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan/perlindungan 15%

d. Program Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Program di lingkungan Ditjen PAUDNI merupakan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian dua tujuan Kementerian, yaitu:

- 1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota
- 2) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.

Kementerian melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, dengan menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal serta UPT yang ada di bawah tanggungjawabnya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
- 2) Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI
- 3) Penyediaan Layanan PAUD
- 4) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
- 5) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
- 6) Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

2. Rencana Kinerja Tahunan

Mengacu pada Renstra Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014, seluruh elemen yang ada berusaha untuk mencapai sepuluh tujuan strategis dan 45 sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Berikut Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal PAUDNI tahun 2012.

a. Layanan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2.10. Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	1. Persentase Anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan PAUD	37.81%
		2. Persentase Kelurahan/Desa memiliki minimal 1 lembaga PAUD Formal	15%
2	Meningkatnya Lembaga PAUD yang Berakreditasi	Persentase Lembaga PAUD Formal berakreditasi	3%
3	Meningkatnya persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education	Persentase Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Orang Tua	5%

b. Layanan Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Tabel 2.11. Program Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup	1. Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus Sekolah Menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan	15 %
		2. Persentase peserta didik program PKH di Pedesaan	10%
		3. Jumlah peserta kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi.	40.000
		4. Persentase Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terbentuk;	42%
		5. Jumlah TUK yang terbentuk.	791
		6. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	10%
		7. Persentase LKP berstandar Internasional	1,5%
		8. Persentase LK P yang memenuhi standar nasional	10%

c. Layanan Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Tabel 2.12. Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya penduduk buta aksara 15-59 tahun	1. Menurunkan jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun melalui pembelajaran Keaksaraan Dasar sehingga melek aksara yang ditandai dengan dimilikinya SUKMA	4,23 %
		2. Meningkatnya penduduk usia 15-59 tahun Pemegang SUKMA yang mengikuti KUM	16%
		3. Menurunnya disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia 15-59 tahun	2,4 %
2	Meningkatnya persentase Kab/Kota	1. Meningkatnya persentase Kab/ kota yang telah menerapkan	54 %

	menerapkan PUG bidang Pendidikan	pengurus utamaan gender (PUG) bidang pendidikan	
		2. Meningkatkan Penduduk Perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh Pendidikan Kecakapan Hidup(PKH)	14 %
3	Meningkatnya Kab/Kota menyelenggarakan kecakapan keorangtuan	1. Meningkatkan Kab/Kota menyelenggarakan Kecakapan Keorangtuan	30%
		2. Meningkatkan jumlah Kab/kota yang menyediakan layanan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	14%
4	Meningkatnya persentase Kab/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM	Meningkatkan Kab/Kota yang telah memiliki TBM ≥ 10 unit	47%
5	Meningkatnya jumlah PKBM bernomor induk lembaga	1. Meningkatkan kecamatan yang memiliki PKBM	60%
		2. Meningkatkan persentase PKBM bernomor induk lembaga	60%
		3. Meningkatkan jumlah Kab/Kota yang memiliki PKBM rujukan	40%

d. Layanan Pembinaan PTK PAUDNI

Tabel 2.13. Program Pembinaan PTK PAUDNI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Persentase PTK-PAUDNI yang mengikuti peningkatan kompetensi	1. Meningkatkan persentase pendidik PAUD mengikuti Diklat teknis 31%	9%
		2. Meningkatkan persentase pendidik Kursus dan Pelatihan mengikuti Diklat Teknis 27%	17%
		3. Meningkatkan persentase pendidik Dikmas mengikuti diklat teknis 31%	9%
		4. Meningkatkan persentase pelatih dan Pembina Pramuka mengikuti diklat teknis 10%	5%
		5. Meningkatkan persentase pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungsional 85%	9%
		6. Meningkatkan persentase penilik mengikuti diklat teknis dan fungsional 65%	9%
		7. Meningkatkan persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis 30%	24%
		8. Meningkatkan persentase pendidik PAUD yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan 21%	15%
		9. Meningkatkan persentase pendidik kursus dan pelatihan yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan 1.67%	0.83%
		10. Meningkatkan persentase pendidik Dikmas mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB) 25%	15%
		11. Meningkatkan persentase pamong belajar mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan PPB) 40%	20%
		12. Meningkatkan persentase penilik mengikuti Pengembangan profesional Berkelanjutan (PPB) 40%	20%
		13. Meningkatkan persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan 21%	15%
		14. Meningkatkan persentase pendidik PAUDNI berkualifikasi S1/D4 6.5%	3%
		15. Meningkatkan persentase pamong belajar berkualifikasi S1/D4 98.3%	15%
		16. Meningkatkan persentase penilik berkualifikasi S1/D4 70%	15%
2	Meningkatnya persentase PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	1. Meningkatkan persentase guru TK/TKLB penerima tunjangan profesi 2.07%	19%
		2. Meningkatkan persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan/perlindungan 15%	17%

e. Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI

Tabel 2.14. Layanan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUDNI

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional	1. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional	76
		2. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dilakukan di tingkat provinsi dan Kab/Kota	1194
		3. Jumlah model percontohan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI	20
2	Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu	1. Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu	10%

B. Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal PAUDNI menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat Direktorat Jenderal yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Direktorat Jenderal yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan rencana strategis. Berikut adalah Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI tahun 2012.

Tabel 2.15. Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2012	Program	Anggaran
1	Meningkatnya APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	1. Persentase Anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan PAUD	37.81%	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	215.455.512.000
		2. Persentase Kelurahan/Desa memiliki minimal 1 lembaga PAUD Formal	15%		
2	Meningkatnya Lembaga PAUD yang Berakreditasi	Persentase Lembaga PAUD Formal berakreditasi	3%		
3	Meningkatnya persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education	Persentase Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Orang Tua	5%		
1	Meningkatkan persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup	1. Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus Sekolah Menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan	15 %	Kegiatan Pembinaan Kursus dan Pelatihan	135.408.197.000
		2. Persentase peserta didik program PKH di Pedesaan	50%		
		3. Jumlah peserta kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi.	40.000		
		4. Persentase Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terbentuk;	30		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2012	Program	Anggaran
		5. Jumlah TUK yang terbentuk.	650		
		6. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	10%		
		7. Persentase LKP berstandar Internasional	1,5%		
		8. Persentase LK P yang memenuhi standar nasional	10%		
1	Menurunnya penduduk buta aksara 15-59 tahun	1. Menurunkan jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun keatas melalui pembelajaran Keaksaraan Dasar sehingga melek aksara yang ditandai dengan dimilikinya SUKMA	4.23%	Kegiatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat	147.076.664.000
		2. Meningkatnya penduduk usia 15 tahun keatas Pemegang SUKMA yang mengikuti KUM	16%		
2	Meningkatnya persentase kecamatan yang menyelenggarakan program PAUDNI	1. Menurunnya disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia 15-59 tahun	2.4%		
		2. Meningkatnya persentase Kab/kota yang telah menerapkan pengarus utamaan gender (PUG) bidang pendidikan	54%		
		3. Meningkatkan Penduduk Perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh Pendidikan Kecakapan Hidup(PKH)	14%		
		4. Meningkatnya jumlah Kab/kota yang menyediakan layanan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	14%		
		5. Meningkatnya jumlah Kab/Kota yang memiliki PKBM rujukan	40%		
		6. Menyediakan layanan Pendidikan Keorngtuan di sejumlah Kab/Kota	30%		
3	Meningkatnya persentase Kab/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM	Meningkatkan Kab/Kota yang telah memiliki TBM \geq 10 unit	47%		
4	Meningkatnya jumlah PKBM bernomor induk lembaga	1. Meningkatkan kecamatan yang memiliki PKBM	60%		
		2. Meningkatkan persentase PKBM bernomor induk lembaga	60%		
1	Meningkatnya Persentase PTK-PAUDNI yang mengikuti peningkatan kompetensi	1. Meningkatnya persentase pendidik PAUD mengikuti Diklat Teknis 31%	9%	Kegiatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI	138.776.532.000
		2. Meningkatnya persentase pendidik Kursus dan Pelatihan mengikuti Diklat Teknis 27%	17%		
		3. Meningkatnya persentase pendidik Dikmas mengikuti diklat teknis 31%	9%		
		4. Meningkatnya persentase pelatih dan Pembina Pramuka mengikuti diklat teknis 10%	5%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2012	Program	Anggaran
		5. Meningkatnya persentase pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungsional 85%	9%		
		6. Meningkatnya persentase penilik mengikuti diklat teknis dan fungsional 65%	9%		
		7. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis 30%	24%		
		8. Meningkatnya persentase pendidik PAUD yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan 21%	15%		
		9. Meningkatnya persentase pendidik kursus dan pelatihan yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan 1.67%	0.83%		
		10. Meningkatnya persentase pendidik Dikmas mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB) 25%	15%		
		11. Meningkatnya persentase pamong belajar mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) 40%	20%		
		12. Meningkatnya persentase penilik mengikuti Pengembangan profesional Berkelanjutan (PPB) 40%	20%		
		13. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan 21%	15%		
2	Meningkatnya persentase PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	1. Meningkatnya persentase guru TK/TKLB penerima tunjangan profesi 2.07%	19%		
		2. Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan/perlindungan 15%	17%		
1	Meningkatnya jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional	1. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional 2. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dilakukan di tingkat provinsi dan Kab/Kota 3. Jumlah model percontohan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI	76 1194 20	Kegiatan Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI	263.741.176.000
2	Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu	Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu	10%		

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan merealisasikan penetapan kinerja Direktorat Jenderal, selama tahun 2012 Ditjen PAUDNI menggunakan pagu anggaran sejumlah Rp 2.936.773.089.000,- (Dua Trilyun Sembilan

Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Secara umum, akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUDNI) merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan penetapan kinerja dan kontrak menteri yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana penjabaran berikut:

1. Capaian Kinerja Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
Pencapaian hasil yang diperoleh dari kegiatan terhadap target Renstra untuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini antara lain:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2011		Tahun 2012		%	Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			PAGU	REALISASI	%
1. Meningkatnya APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	1. Persentase Anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan PAUD	33,67%	29,6%	37,81%	37,83%	100,05	Pendidikan Anak Usia Dini	215.455	194.219	90,14
	2. Persentase Kelurahan/Desa memiliki minimal 1 lembaga PAUD Formal	10%	50%	15%	25%	166,67		.512.000	.956.323	
2. Meningkatnya Lembaga PAUD yang Berakreditasi	1. Persentase Lembaga PAUD Formal berakreditasi	31,5%	42,5%	3%	23,35%	778,33				
3. Meningkatnya persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education	1. Persentase Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Orang Tua	2,5%	0,49%	5%	5%	100				

- Pada tahun 2012 ditetapkan target peningkatan APK PAUD sebesar 37,81% dengan realisasi sebesar 37,83%. Ketercapaian tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah yakni untuk perluasan akses. Salah satu program yang dilaksanakan Direktorat Pembinaan PAUD adalah dengan mengangkat bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, dengan tujuan untuk mensosialisasikan pentingnya PAUD.
- Untuk perluasan akses dan layanan pada tahun 2012 disosialisasikannya kelurahan/desa yang memiliki minimal satu lembaga PAUD, dari target 15% telah terrealisasi 25%

- Untuk lembaga PAUD terakreditasi per tahun 2012 dapat dicapai sebesar 23,35% dari target sebanyak 3%. Pencapaian ini diperoleh melalui pemberian bantuan APE PAUD sejumlah 500 lembaga dan



sarana pembelajaran alat bermain/peraga PAUD sebanyak 34 lembaga, serta bantuan kerjasama dengan organisasi mitra PAUD sebanyak 896 lembaga. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong akreditasi lembaga PAUD adalah menyelenggarakan lembaga PAUD Percontohan tingkat Kabupaten/Kota dan melakukan pendampingan kepada lembaga PAUD melalui kerjasama dengan organisasi mitra.

- Pada tahun 2012 ditargetkan 5% lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Keorngtuaan dan sampai akhir Desember ini sudah terrealisasi 5%.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Pencapaian hasil yang diperoleh dari kegiatan terhadap target Renstra untuk layanan Kursus dan Pelatihan antara lain:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2011		Tahun 2012		%	Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			PAGU	REALISASI	%
1. Meningkatkan persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan berbasis kecakapan hidup	1. Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus Sekolah Menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan	13%	8,17%	15 %	4,74	31,6	Kursus dan Pelatihan	135.408.197.000	130.849.930.239	96,63
	2. Persentase peserta didik program PKH di Pedesaan	12%	8%	50%	13,40%	26,8				
	3. Jumlah peserta kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi.	30.000	28.324	40.000	58.953	147,38				
	4. Jumlah Lembaga Sertifikasi	24	24	30	29	97,40				

	Kompetensi (LSK) yang terbentuk;							
5.	Jumlah TUK yang terbentuk.	550	641	650	635	80,27		
6.	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	5%	5,48%	10%	8,64%	86,4		
7.	Persentase LKP berstandar Internasional	1%	0,71%	1,5%	2,03%	13,53		
8.	Persentase LK P yang memenuhi standar nasional	5%	2,81%	10%	8,64%	86,4		

- Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus Sekolah Menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan kursus dan pelatihan yang ditargetkan sebesar 15% atau sebanyak 232.573 orang dari sekitar 1,5 juta sasaran, hingga akhir Desember 2012 mencapai 4,74% atau sebesar 73.466 orang. Ketidaktercapaian target sasaran ini dikarenakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program PHK, PKM, dan Desa Vokasi melalui dana bantuan sosial pada tahun ini hanya teralokasikan sebesar 71.932 orang;
- Jumlah peserta didik kursus program pendidikan kecakapan hidup di pedesaan yang ditargetkan sebesar 10% atau sekitar 23.240 orang dari total peserta layanan kursus dan pelatihan dapat tercapai 4,3% atau sebanyak 9.842 orang;
- Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi yang ditargetkan sebanyak 40.000 orang hingga akhir Desember 2012 mencapai 79.783 orang, terdiri dari tahun 2010 sebanyak 23.702, tahun 2011 sebanyak 25.800, dan tahun 2012 sebanyak 30.281 orang;
- Jumlah Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terbentuk 29 LSK dari 30 LSK yang ditargetkan tahun 2012. Tiga lembaga yang ditargetkan untuk ditetapkan pada tahun ini hanya terrealisasi 2 LSK dan 1 LSK masih menunggu penetapan;



Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup bidang keterampilan otomotif sedang mengikuti praktik kerja

- Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terbentuk sebanyak 636 TUK (78,38%) dari 791 TUK yang ditargetkan tahun ini. Target pembentukan TUK tidak tercapai sesuai target karena alokasi anggaran untuk pembentukan TUK tidak teralokasikan sesuai target;
- Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang berkinerja A dan B yang ditargetkan mencapai 10% atau sekitar 1.400 LKP dari total LKP yang ada, hingga pertengahan Desember 2012 tercapai sebesar 8,64% atau 904 LKP;
- Persentase LKP yang berstandar internasional yang ditargetkan sebesar 1,5% atau sekitar 210 LKP, hingga akhir Desember 2012 tercapai 212 lembaga (2,03%);
- Persentase LKP yang berstandar nasional yang ditargetkan sebesar 10% atau sekitar 1.400 LKP, hingga akhir Desember 2012 tercapai 904 lembaga atau 8,64%, hal ini juga terkait dengan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

3. Capaian Kegiatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Pencapaian hasil yang diperoleh dari kegiatan terhadap target Renstra untuk layanan Pendidikan Masyarakat antara lain:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2011		Tahun 2012		%	Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			PA GU	REALISASI	%
1 Menurunnya penduduk buta aksara 15-59 tahun	1. Menurunkan jumlah Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun melalui pembelajaran Keaksaraan Dasar sehingga melek aksara yang ditandai dengan dimilikinya SUKMA	4,8%	4,43%	4,23 %	4,21%	100,47	Pendidikan masyarakat	147.076.664.000	136.579.740.338	92,86
	2. Meningkatnya penduduk usia 15-59 tahun Pemegang SUKMA yang mengikuti KUM	9%	9,03%	16 %	16,06%	100,37				
	3. Menurunnya disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia 15-59 tahun	2,7%	2,34%	2,4 %	2,17%	109,58				
2 Meningkatnya persentase Kab/Kota menerapkan PUG bidang Pendidikan	4. Meningkatnya persentase Kab/kota yang telah menerapkan pengarus utamaan gender (PUG) bidang pendidikan	23%	48,70%	54 %	57,34%	117,74				
	5. Meningkatkan Penduduk Perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh Pendidikan Kecakapan	10%	10,35%	14 %	14%	100				

		Hidup(PKH)						
3	Meningkatnya Kab/Kota menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan	6. Meningkatkan Kab/Kota menyelenggarakan Kecakapan Keorangtuaan	10%	20,42%	30%	30,98%	103,27	
		7. Meningkatkan jumlah Kab/kota yang menyediakan layanan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	-	-	14%	14,68%	104,85	
4	Meningkatnya persentase Kab/Kota yang telah memiliki minimal 10 TBM	8. Meningkatkan Kab/Kota yang telah memiliki TBM ≥ 10 unit	35%	36%	47%	47,19%	100,40	
5	Meningkatnya jumlah PKBM bermomor induk lembaga	9. Meningkatkan kecamatan yang memiliki PKBM	50%	56%	60%	60%	100	
		10. Meningkatkan persentase PKBM bermomor induk lembaga	50%	50%	60%	59,95%	99,91	
		11. Meningkatkan jumlah Kab/Kota yang memiliki PKBM rujukan	20%	20%	40%	40,04%	100,10	

- Target kinerja menurunkan jumlah penduduk buta aksara usia 15-59 tahun menjadi sebesar 4,23%, yang telah dipenuhi dengan realisasi sebesar 4,21%. Pencapaian target ini dapat terjadi dengan melaksanakan komponen yang secara langsung dapat menurunkan angka buta aksara yaitu keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan dan budaya baca melalui Koran ibu, Koran Anak serta cerita rakyat. Selain itu yang menjadi pendukung dari suksesnya indikator ini adalah pelaksanaan pameran Hari Aksara Internasional dan Seminar Internasional Keaksaraan Bahasa Ibu dan TIK karena mendorong para kepala daerah untuk berlomba-lomba menggarap sisa penduduk yang belum melek aksara dengan mengalokasikan anggaran kegiatan penuntasan buta aksara.
- Target peningkatan penduduk usia 15-29 tahun pemegang SUKMA mengikuti KUM menjadi sebesar 16% dan telah terealisasi sebesar 16,06%. Persentase ini didapat dengan membelajarkan 1.335.976 orang dari total 8.318.605 orang pemegang SUKMA. Faktor pendukung dari tercapainya target ini adalah adanya partisipasi dari pemerintah daerah dengan mengalokasikan anggaran untuk Keaksaraan Usaha Mandiri. Selain itu, antusias dari peserta keaksaraan untuk mengikuti kegiatan benar-benar tuntas belajar aksara juga tinggi.
- Target menurunkan disparitas Gender menjadi 2,4% dapat terrealisasi sebesar 2,17%. Hal yang mendorong menurunnya disparitas gender adalah terbukanya kesempatan, baik perempuan maupun laki-laki untuk mengikuti pendidikan.
- Target kabupaten/kota yang menerapkan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan menjadi sebesar 54%, tercapai dengan realisasi

sebesar 57,34%. Upaya mendorong peran Kab/Kota dalam menerapkan Pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan dilakukan dengan memberikan bantuan untuk peningkatan kapasitas kelompok kerja PUG kepada Kab/Kota. Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi PUG lintas sektor dan pendampingan lembaga PUG bidang pendidikan.

- Target pencapaian penduduk perempuan berkeaksaraan dasar dan lansia mengikuti pendidikan kecakapan hidup menjadi sebesar 14% dapat terealisasi sebesar 14%.
- Target Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan PTPPO tahun 2012 menjadi sebesar 14% telah terealisasi 14,68%
- Target peningkatan jumlah kabupaten/kota yang memiliki PKBM rujukan sebesar 40% dengan realisasi mencapai 40,04%
- Target peningkatan Kab/Kota yang memiliki TBM 10 atau lebih menjadi sebesar 47% dengan realisasi sebesar 47,19%
- Target peningkatan Kecamatan yang memiliki PKBM menjadi sebesar 60% dengan realisasi 60%. Jumlah Kecamatan yang memiliki PKBM saat ini tercatat 3.795 kecamatan atau 60%. Pencapaian itu dapat terwujud dengan bantuan perluasan akses PKBM di mana kecamatan yang belum memiliki PKBM didorong untuk membentuk PKBM.
- Target peningkatan persentase PKBM ber-nomor induk lembaga sebesar 60% dengan realisasi mencapai 59,95%. Dengan dimilikinya NILEM oleh PKBM, dapat mempermudah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PKBM dalam rangka mempersiapkan untuk memperoleh akreditasi.



4. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Pencapaian hasil yang diperoleh dari kegiatan terhadap target Renstra untuk layanan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI antara lain:

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2011		Tahun 2012		%	Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			PAGU	REALISASI	%
1. Meningkatkan Persentase PTK-PAUDNI yang	1. Meningkatnya persentase pendidik PAUD	19%	22%	9%	26,39%	293	Pembinaan PTK PAUDNI	138.776.532.000	127.237.764.589	91,69

mengikuti peningkatan kompetensi	mengikuti Diklat Teknis								
	2. Meningkatnya persentase pendidik Kursus dan Pelatihan mengikuti Diklat Teknis	15%	5%	17%	48,76%	287			
	3. Meningkatnya persentase pendidik Dikmas mengikuti diklat teknis	22%	28%	9%	13,09%	145,41			
	4. Meningkatnya persentase pelatih dan Pembina Pramuka mengikuti diklat teknis	39%	67%	5%	2,14%	42,73			
	5. Meningkatnya persentase pamong belajar mengikuti diklat teknis dan fungsional	70%	70%	9%	27,91%	310			
	6. Meningkatnya persentase penilik mengikuti diklat teknis dan fungsional	50%	53%	9%	19,96%	222			
	7. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat teknis	21%	21%	24%	16,68%	70			
	8. Meningkatnya persentase pendidik PAUD yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan	12%	20%	15%	59,98%	400			
	9. Meningkatnya persentase pendidik kursus dan pelatihan yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan	0,42%	0,45%	0,83%	9,87%	1184,65			
	10. Meningkatnya persentase pendidik Dikmas mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB)	10%	5%	15%	28,14%	187,58			

2	Meningkatnya persentase PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan perlindungan	11. Meningkatnya persentase pamong belajar mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan (PPB)	10%	8,19%	20%	35,09%	175,47		
		12. Meningkatnya persentase penilik mengikuti Pengembangan profesional Berkelanjutan (PPB)	10%	9,09%	20%	31,54%	157,71		
		13. Meningkatnya persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan	12%	7%	15%	5,28%	35,17		
		1. Meningkatnya persentase guru TK/TKLB penerima tunjangan profesi	1,20%	66%	19%	19,97%	105,10		
		2. Meningkatnya persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan/ perlindungan	15%	30%	17%	23%			

- Persentase pendidik PAUD yang mengikuti diklat teknis mencapai 26,39% dari target 9 %. Capaian ini melampaui target dikarenakan strategi pemberdayaan yang melibatkan orsosmas/mitra/ training provider dalam penyelenggaraan diklat. Tahun 2012 telah disalurkan ke 167 lembaga yang melaksanakan diklat teknis dengan total peserta 9.716 orang
- Persentase Pendidik Kursus dan Pelatihan yang mengikuti diklat teknis mencapai 48,76% dari target 17%. Diklat kursus dan pelatihan ini melibatkan MKIKP (Musyawarah Kerja Instruktur Kursus dan Pelatihan), TOT oleh direktorat PPTK PAUDNI, dan oleh lembaga kursus dalam pelaksanaan diklatnya dengan total peserta sebanyak 2.440 Orang.
- Persentase Pendidik Dikmas yang mengikuti diklat teknis mencapai 13,09% dari target 5%. Pendidik Dikmas yang dilatih pada tahun 2012 adalah Tutor Keaksaraan bekerjasama dengan Forum Tutor Keaksaraan dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang.

- Persentase pelatih dan Pembina Pramuka yang mengikuti diklat teknis mencapai 2,14% dari target 5%. Ketidacapaian ini disebabkan pada tahun 2012 pelatih dan pembina pramuka belum merupakan kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran belum cukup dialokasikan untuk mencapai target.
- Persentase pamong belajar yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sudah mencapai 27.91% dari target 9%. Capaian ini ditempuh dengan adanya diklat teknis (652 orang) dan diklat fungsional (98 orang).
- Persentase penilik yang mengikuti diklat teknis dan fungsional sudah mencapai 19,96% dari target 9%. Capaian ini ditempuh dengan adanya diklat teknis (733 orang) dan diklat fungsional (84 orang).
- Persentase tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal yang mengikuti diklat teknis sudah mencapai 16,68% dari target 24%. Capaian ini ditempuh dengan adanya diklat TLD/FDI (40 orang) dan diklat Pengelola PKBM dan TBM (78 orang).
- Persentase pendidik PAUD yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan mencapai 59.98% dari target 15 %. Capaian ini melampaui target dikarenakan strategi pemberdayaan yang melibatkan Asosiasi/Orsosmas dalam penyelenggaraan diklat PAUD tingkat dasar. Tahun 2012 telah disalurkan ke 90 lembaga yang melaksanakan diklat teknis dengan total peserta 4.200 orang
- Persentase Pendidik Kursus dan Pelatihan yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan mencapai 9,87% dari target 0.83%. Pengembangan profesional ini ditempuh melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh HISPPi di 8 regional dengan total peserta sebanyak 494 Orang.
- Persentase pendidik dikmas yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan mencapai 28,14% dari target 15%. Penyelenggaraan diklat bekerjasama dengan 7 asosiasi/forum (IPABI, IPI, Forum Komunikasi TLD/FDI, Forum PKBM, Forum TBM, Forum Tutor Pendidikan Keaksaraan, dan Forum IT) yaitu melalui kegiatan pembinaan karir PTK PAUD NI.
- Persentase pamong belajar yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan mencapai 35,09% dari target 20%. Ketercapaian IKK ini dengan melibatkan IPABI (Ikatan Pamong Belajar Indonesia) di 16 propinsi/Kabupaten/kota dengan total peserta 640 orang.



- Persentase penilik yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan mencapai 31.54% dari target 20%. Ketercapaian IKK ini dengan melibatkan IPI (Ikatan Penilik Indonesia) di 16 propinsi/Kabupaten/kota dengan total peserta 640 orang.
- Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan mencapai 5.28% dari target 15%. Ketidaktercapaian IKK ini dikarenakan tenaga kependidikan (selain penilik) belum diprioritaskan pada tahun 2012 untuk mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan sehingga baru diklat teknis saja yang dilaksanakan.
- Persentase Guru TK/TKLB sebagai penerima tunjangan profesi sudah mencapai 19,97% dari target 19%. Capaian ini didukung dengan adanya penambahan dana APBNP dikarenakan SK yang dikeluarkan melebihi kuota.
- Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan/perindungan sudah mencapai 23.30% dari target 17%.

5. Capaian Kegiatan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUDNI

Pencapaian hasil yang diperoleh dari kegiatan terhadap target Renstra untuk layanan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUDNI, antara lain:

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Kegiatan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2011		Tahun 2012		%	Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi			PAGU	REALISASI	%
1. Meningkatnya jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional	1. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat regional	45	53	76	80	105,26	Pengkajian, pengembangan, dan pengendalian mutu PAUDNI	263.741.176.000	244.697.399.217	92,78
	2. Jumlah model percontohan PAUDNI yang dilakukan di tingkat provinsi dan Kab/Kota	796	1890	1194	1631	136,50				
	3. Jumlah model percontohan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI	15	18	20	20	100				
2. Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu	4. Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu	6%	6%	10%	10%	100				

- Jumlah model percontohan PAUDNI yang dikembangkan di tingkat nasional sebesar 76 model telah terrealisasi 80 model

- Jumlah model percontohan PAUDNI yang dilakukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mencapai 1631 lembaga dari target 1194 lembaga atau telah melebihi target sebesar 136,5%
- Jumlah model percontohan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI sebanyak 20 model telah terrealisasi 20 model
- Persentase lembaga PAUDNI yang mendapatkan pengendalian mutu sudah tercapai 10% dari target 10% yang telah ditetapkan atau sebanyak 743 lembaga telah mendapat pengendalian mutu.

Selain capaian yang diperoleh berdasarkan kontrak penetapan kinerja Ditjen PAUDNI juga telah berhasil mencapai prestasi atau penghargaan lainnya yaitu:

- a. Penghargaan *King Sejong Literacy Prizes* untuk keberhasilan dalam penuntasan buta aksara yang diperoleh di UNESCO;
- b. Penghargaan sebagai pengelola kearsipan dan dokumen terbaik di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pagu belanja Direktorat Jenderal PAUDNI dalam DIPA dibagi dalam 4 (empat) pos pengeluaran (Belanja), yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal, (4) Bantuan Sosial (Bansos). Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk Belanja Pegawai, misalnya gaji dan tunjangan-tunjangan. Pos pengeluaran Belanja Barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran Belanja Modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Pos pengeluaran Belanja Bansos yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan bantuan sosial kepada penyelenggaraan pendidikan berupa dana Bantuan Operasional Pendidikan, Rintisan PAUD dan lain-lain.

Realisasi Anggaran

Atas hasil pelaksanaan kegiatan program PAUDNI, dari alokasi sebesar Rp 2.936.773.089.000, realisasi pengeluaran DIPA sampai bulan Desember tahun 2012 adalah Rp 2.767.716.934.904,- Sehingga daya serap anggaran Ditjen PAUDNI sampai Desember 2012 yakni:

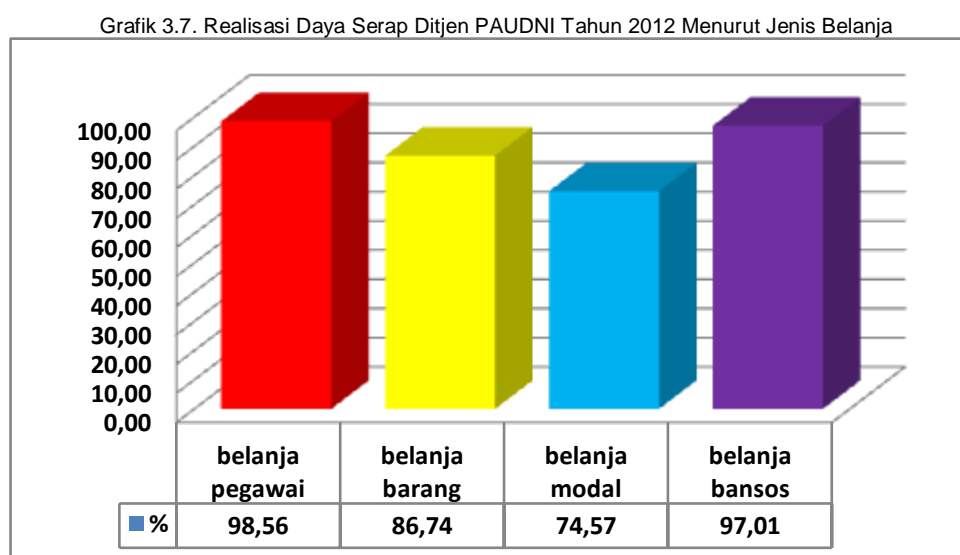
$$\frac{\text{Rp } 2.767.716.934.904,-}{\text{Rp } 2.936.773.089.000,-} \times 100\% = 94,24\%$$

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat kondisi serapan anggaran di lingkungan Ditjen PAUDNI Tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel 3.6. Kondisi Serapan Anggaran di Lingkungan Ditjen PAUDNI Tahun 2012

No	Satuan Kerja	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Sekretariat Ditjen PAUDNI	100.277.882.000	83.940.890.419	83,71	16.336.991.581
2	Direktorat Pembinaan PAUD	215.455.512.000	194.219.956.323	90,14	21.235.555.677
3	Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat	147.076.664.000	136.579.740.338	92,86	10.496.923.662
4	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	135.408.197.000	130.849.930.239	96,63	4.558.266.761
5	Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI	138.776.532.000	127.237.764.589	91,69	11.538.767.411
6	UPT/Pusat/Balai Pengembangan PAUDNI	263.741.176.000	244.697.399.217	92,78	19.043.776.783
7	Dekonsentrasi	1.936.037.126.000	1.850.191.253.779	95,57	85.845.872.221
	Total	2.936.773.089.000	2.767.716.934.904	94,24	169.056.154.096

Berikut ini grafik yang memperlihatkan capaian perincian per jenis belanja Ditjen PAUDNI, Tahun 2012:



Dari grafik di atas terlihat capaian dari masing-masing jenis belanja pada Ditjen PAUDNI sampai Desember 2012 yaitu Belanja Pegawai: Rp 52.764.919.950,- (98,56%), Belanja Barang: Rp 616.463.905.023,- (86,74%), Belanja Modal: Rp 29.263.152.245,- (74,57%) dan Belanja Bansos: Rp 2.066.224.957.686,- (97,01%)

Pencapaian kinerja keuangan Ditjen PAUDNI tahun 2012 lebih baik dibandingkan dengan capaian yang diraih pada tahun 2011 yang hanya sebesar 89,08%. Capaian Ditjen PAUDNI juga lebih tinggi dari capaian tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hanya sebesar 87,18%.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, belanja yang terendah di dapat oleh belanja modal yang hanya sebesar 74,57%. Kendala/permasalahan yang

menyebabkan rendahnya penyerapan adalah (1) efisiensi di dalam pengadaan barang dan jasa, di mana harga yang ditawarkan oleh penyedia barang dan jasa lebih rendah daripada Harga Perkiraan Sendiri Panitia Pengadaan, (2) surat persetujuan dari Kementerian PAN dan RB serta Kementerian PU terlambat diterima, sehingga tidak seluruh pekerjaan dapat diserap, (3) pembangunan gedung yang diblokir.

Selanjutnya, capaian yang rendah lainnya yaitu Belanja Barang yang hanya sebesar 86,74%. Hal tersebut dikarenakan dalam beberapa kegiatan yang diselenggarakan terdapat efisiensi dari sisi biaya perjalanan dinas dan akomodasi/penginapan (*ad cost*). Walau capaian keuangan dari belanja barang hanya 86,74% tetapi secara fisik, seluruh kegiatan dapat terlaksana (100%).



PENUTUP

Akuntabilitas kinerja ini menggambarkan kinerja secara keseluruhan Ditjen PAUDNI yang terealisasi melalui unit-unit kerjanya. Pencapaian kinerja Ditjen PAUDNI didasarkan pada terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2012.

Pencapaian kinerja Ditjen PAUDNI secara keseluruhan sudah terlaksana seperti yang telah direncanakan, dan sudah banyak mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian masih ada yang pencapaiannya di bawah target yang tentunya perlu difikirkan strategi untuk pencapaiannya di tahun mendatang. Sementara itu, kinerja keuangan yang dicapai juga sudah mendekati target yaitu 94,24% dari target 95%.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2012 ini disusun, selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian target kinerja Ditjen PAUDNI di masa mendatang.